

Judul : Penanggulangan Kemiskinan Perkampungan Kumuh di Provinsi Riau
Tahun : 2008
Penulis : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau
Kategori : Sosial, Ekonomi dan Pembangunan Daerah

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional, yang tidak hanya ditandai oleh rendahnya pendapatan penduduk (ekonomi). Tetapi juga digambarkan oleh rendahnya kualitas kesehatan dan rendahnya tingkat pendidikan penduduk. Berdasarkan data Balitbang Provinsi Riau 2004, sebagian besar (60,87%) kepala rumah tangga miskin memiliki pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar, dan masih terdapat 28,41% yang buta huruf, dan hanya sebagian kecil kepala rumah tangga yang memiliki pendidikan SLTP sederajat, dan SLTA sederajat. Kondisi ini menggambarkan kualitas sumberdaya manusia di Provinsi Riau sangat rendah dan membutuhkan intervensi agar keluarga tersebut memiliki kemampuan dalam memanfaatkan dirinya sendiri dan mengelola potensi sumberdaya alam untuk memenuhi kehidupan. Apakah penyebab kemiskinan masyarakat yang tinggal di perkampungan kumuh. Bagaimana efektifitas program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan, Bagaimana peran segenap *stakeholders* dalam penanggulangan kemiskinan di perkampungan kumuh.

Penelitian ini ingin mencoba untuk mencari solusi terhadap penanggulangan kemiskinan di perkampungan kumuh di Propinsi Riau oleh karena permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut: Apakah penyebab kemiskinan masyarakat yang tinggal di perkampungan kumuh? Dan bagaimana efektifitas program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan serta Bagaimana peran segenap *stakeholders* dalam penanggulangan kemiskinan di perkampungan kumuh. Pendekatan penelitian ini adalah metode kuantitatif dan kualitatif sehingga diharapkan hasil dari mix metode ini bisa menjawab dan memberikan solusi terhadap penanggulangan kemiskinan perkampungan kumuh di Propinsi Riau.

Faktor terbesar yang harus mendapat perhatian adalah pada aspek akses terhadap faktor-faktor produksi. Hal ini meliputi modal kerja (dana), akses pada lahan/areal untuk berusaha (semisal lahan pertanian), akses untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan layak, ataupun secara fisik berupa infrastruktur publik yang dapat mendukung kegiatan perekonomian masyarakat. Dan kedepan diperlukan program-program pembangunan yang mendasarkan pada analisa kebutuhan masyarakat. Keberhasilan program lebih banyak ditentukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat luas sebagai subyek pembangunan. Intinya, masyarakat bersama dengan para pemangku kebijakan (*stakeholders*) “saling merangkai tangan dalam satu irama” dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Analisa kebutuhan masyarakat serta rasa “memiliki” atas program tersebut akan mendorong program-program dapat berjalan dengan mansiri di masyarakat. Tinggal bagaimana pemerintah memfasilitasinya dengan memperhatikan segala potensi yang tumbuh di masyarakat, baik potensi sosio-kultur, ekonomi, potensi SDM, maupun potensi sumberdaya alamnya.